

Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Biaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumatera Utara

Khoirun Fadilah Lubis¹, Kamilah, K²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

khoirunfadilahlubis@gmail.com¹, Kamila@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to determine how the application of cost responsibility accounting at the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of North Sumatra. The research method in this study is the research method used descriptively using a qualitative approach. Prince Diponegoro No. 21A, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Medan City, North Sumatra. Data collection techniques in this study were by means of interviews, documentation and observation. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study explained that the 2019 BAPPEDA Medan's effectiveness ratio, North Sumatra Province was 99.46%, in 2020 the effectiveness level decreased by 3.07% to 96.40% and in 2021 the effectiveness level increased on a small scale, namely 1.02%. be 97.42%, then the tendency of the role of cost responsibility accounting in the regional development planning agency (BAPPEDA) of North Sumatra can be said to be very effective, so the results in this study are considered positive.

Keywords: *Accountability Accounting, BAPPEDA*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban biaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumatera Utara. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini adalah kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumatera Utara yang bergerak dibidang pembangunan daerah yang berlokasi tepatnya di Jl. Pangeran Diponegoro No. 21A, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah dijelaskan Rasio efektivitas tahun 2019 BAPPEDA Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 99,46%, pada tahun 2020 tingkat efektivitas menurun 3,07 % menjadi 96,40% dan pada tahun 2021 tingkat efektivitas meningkat dalam skala kecil yaitu 1,02 % menjadi 97,42%, maka kecenderungan peranan akuntansi pertanggungjawaban biaya pada badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Sumatera Utara dapat dikatakan dalam kriteria sangat efektif, sehingga hasil pada penelitian ini di anggap positif.

Kata Kunci: *Akuntansi Pertanggungjawaban, BAPPEDA*

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana Instansi Pemerintah, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Bappeda) melaksanakan rencana strategik dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang salah satunya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota melalui sekretariat daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. (Abdullah, 2017)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan dan kemajuan di bidang pemerintah, dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, khususnya di bidang pemerintahan, dalam hal ini kesemua aspek yang ada dalam proses pengambilan keputusan dalam proses dan pedoman pembentukan penyusunan anggaran dan belanja daerah agar terlaksana. Dalam pengukuran kinerja keuangan pada Bappeda ini lebih terfokuskan kepada perhitungan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang ada pada Bappeda dengan cara menggunakan beberapa perhitungan analisis rasio, dimana perhitungan rasio pada pemerintahan tidak lah sama dengan perhitungan analisis rasio yang ada pada instansi-instansi perusahaan. Dalam hal ini sangatlah penting bagi Bappeda dalam melakukan berbagai penetapan analisis dalam penggunaan anggaran dan juga belanja yang ada pada instansinya. (Daniri, 2018)

Menimbang dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu, maka atas dasar pertimbangan di atas, pengaturan tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 ,dipandang perlu untuk di tinjau kembali. (Dwi, 2019)

Sehubungan dengan itu peranan akuntansi semakin dibutuhkan terutama untuk memperoleh informasi. Peran serta pegawai sangat dibutuhkan dalam mengaktualisasikan peranan akuntansi tersebut sebagai alat pengawasan biaya yang kita kenal dengan akuntansi pertanggungjawaban. Oleh karena itu perlu adanya suatu pengendalian. Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan

aspirasi masyarakat (Kahsahlnal, 2019). Dalam menciptakan kepuasan dan pelayanan terhadap publik maka diperlukan akuntansi pertanggungjawaban dan transparansi karena membantu kinerja yang baik untuk para pegawai. (Hermansyah et al., 2018)

Akuntansi pertanggungjawaban sebenarnya timbul sebagai akibat adanya wewenang yang diberikan dan bagaimana mempertanggungjawabkannya dalam bentuk suatu laporan tertulis berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang tersebut. Oleh karena itu yang menjadi dasar dibentuknya sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah konsep mengenai pemisahan secara tugas antara wewenang dan tanggung jawab. Oleh karena itu kantor perlu menerapkan akuntansi pertanggungjawaban pada masa yang akan datang dan pada masa kini. Semakin baik peranan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada kantor Bappeda, maka akan semakin baik pula pengendalian biaya, sedangkan pengendalian biaya yang baik akan memudahkan peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam kantor sehingga tujuan kantor dapat dicapai. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai akuntansi pertanggungjawaban biaya dengan judul *"Akuntansi Pertanggungjawaban Biaya Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumatera Utara"*

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban muncul sebagai akibat dari adanya pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer lebih atas kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otoritas secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang tersebut akan dilaksanakan. Menurut Trisnawati (2006:5) ada tiga alasan mengapa manajer mendelegasikan wewenangnya. Walaupun ada tugas dan wewenang yang didelegasikan atasan kepada bawahan, namun otoritas pimpinan tetap dipertahankan. Sebagai konsekuensi dari orang yang menerima wewenang, harus mempertanggungjawabkan wewenang tersebut kepada atasannya. Tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melaksanakan wewenang yang dilimpahkan, dimana terjadi pelimpahan suatu peranan perorang atau dalam kelompok, untuk berperan dalam kegiatan. (Abdullah, 2017)

Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seorang manajer harus dibebani tanggung jawab atas kinerjanya sendiri dan kinerja bawahannya. Konsep akuntansi pertanggungjawaban menjadi pedoman departemen akuntansi untuk mengumpulkan, mengukur dan melaporkan kinerja sesungguhnya, kinerja yang diharapkan dan selisih yang timbul dalam setiap pertanggungjawaban. Akuntansi Pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang

bertanggungjawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan (Suriadi, 2018) Definisi tersebut mengatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban mengelompokkan organisasi atas pusat-pusat pertanggungjawaban, sehingga apabila terjadi penyimpangan atas anggaran, maka pihak manajemen dapat mencari orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang terjadi.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang utama, karena anggaran merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintah. Anggaran merupakan alat penting sebagai perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Dengan anggaran manajemen dapat menentukan efektivitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil aktual (realisasi terkini) yang dicapai.

Akuntansi pertanggungjawaban bukan hanya untuk menunjukkan terjadinya penyimpangan biaya yang diperlihatkan dalam laporan kinerja manajer, tetapi yang terutama adalah sebagai manfaat dengan memberi informasi bagaimana kegiatan yang menjadi tugas manajer pusat pertanggungjawaban dilakukan. Melalui informasi ini diharapkan akan timbul motivasi bagi manajer untuk bekerja lebih efektif dan efisien serta dapat melakukan tindakan korektif yang diperlukan agar hasil yang diperoleh merupakan yang terbaik dengan tidak mengesampingkan tujuan perusahaan. (Pratama, 2019)

Akuntansi pertanggungjawaban menurut adalah suatu system akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan.

Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban

Tujuan dan Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli jelaslah bahwa tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah mengajak para karyawan untuk melakukan pekerjaan yang benar serta dapat bertanggungjawab atas penyimpangan biaya maupun penghasilan (pendapatan) perusahaan. Adapun keuntungan dari akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri adalah individu dalam organisasi ikut berperan serta dalam mencapai sasaran perusahaan secara efektif dan efisien. Menurut (Abdullah, 2013) informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi yang akan datang bermanfaat untuk: (Hendryani, 2018)

- a. Informasi akuntansi sebagai dasar penyusunan anggaran.
- b. Informasi akuntansi sebagai penilaian kinerja manager pusat pertanggungjawaban.
- c. Informasi akuntansi sebagai pemotivasi manager.
- d. Informasi akuntansi memungkinkan pengelolaan aktivitas.

- e. Informasi akuntansi memungkinkan pemantauan efektivitas program pengelolaan aktivitas.

Faktor-faktor yang Menunjang Efektivitas Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban

Sebelum sistem akuntansi pertanggungjawaban disusun, harus lebih dahulu dipelajari garis wewenang dan tanggung jawab pembuatan keputusan sehingga dapat ditentukan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban dirancang khusus sesuai dengan struktur organisasi untuk dapat menyajikan laporan-laporan kinerja yang berguna dalam menilai sumbangan manajer tingkat tertentu dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Menurut (Yogi Setiyo, 2019) akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan dengan baik apabila terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Luas wewenang dan tanggung jawab pembuatan keputusan harus ditentukan dengan baik melalui standar organisasi.
- b. Manajer pusat pertanggungjawaban harus berperan serta dalam penentuan tujuan yang digunakan untuk mengukur kinerjanya.
- c. Manajer pusat pertanggungjawaban harus berusaha untuk mencapai tujuan yang ditentukan untuknya dan untuk pusat pertanggungjawabannya.
- d. Manajer pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas kegiatan pusat pertanggungjawaban yang dapat dikendalikannya.
- e. Hanya biaya, pendapatan, laba dan investasi yang terkendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang harus dimasukkan ke dalam laporan kinerjanya.
- f. Laporan kinerja dan umpan baliknya untuk manajer pusat pertanggungjawaban harus disajikan tepat waktu.
- g. Laporan kinerja harus menyajikan secara jelas selisih yang terjadi, tindakan koreksi, dan tindak lanjutnya sehingga memungkinkan diterapkannya prinsip pengecualian

Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban

Pada perusahaan yang besar di mana kegiatan-kegiatan operasionalnya cukup kompleks dan mempunyai jenis biaya yang tepat dan dapat secara langsung mengidentifikasi dan mengontrol setiap penyimpangan biaya yang terjadi untuk kemudian dipertanggungjawabkan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem akuntansi pertanggungjawaban yaitu suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dilakukan sesuai dengan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat dipilih orang yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan dari biaya dan penghasilan yang dianggarkan. Menurut Mulyadi (2001), sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem pengumpulan biaya, untuk kepentingan pengendalian biaya, yaitu dengan cara menggolongkan, mencatat, dan meringkas biaya-biaya dalam hubungannya dengan

tingkat-tingkat manajemen yang bertanggung jawab. Pengendalian biaya dengan akuntansi pertanggungjawaban dilakukan dengan cara menghubungkan biaya dengan orang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya biaya tersebut. Di mana setiap pusat pertanggungjawaban menyusun anggaran biayanya masing-masing dengan memperhatikan tujuan perusahaan. (Meliza, 2018)

Sebagaimana tercantum dalam Alquran surat Ali Imran (3) ayat 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

"Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya."

Pengukuran Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggung jawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya 20 adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. 19 Dengan demikian setiap pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa analisis rasio kinerja keuangan daerah yang antara lain: analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, rasio belanja langsung terhadap total belanja, rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja, analisis rasio efektivitas dan efisiensi belanja. Untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah berupa angka efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Maka pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi belanja. Pengukuran kinerja anggaran yang difungsikan untuk menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah yang digunakan oleh instansi. Efisiensi merupakan perbandingan output dan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. (Balsarl, 2018)

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini adalah kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumatera Utara yang bergerak dibidang pembangunan daerah yang berlokasi tepatnya di Jl. Pangeran Diponegoro No. 21A, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan yaitu dari bulan januari sampai februari 2022. Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara,

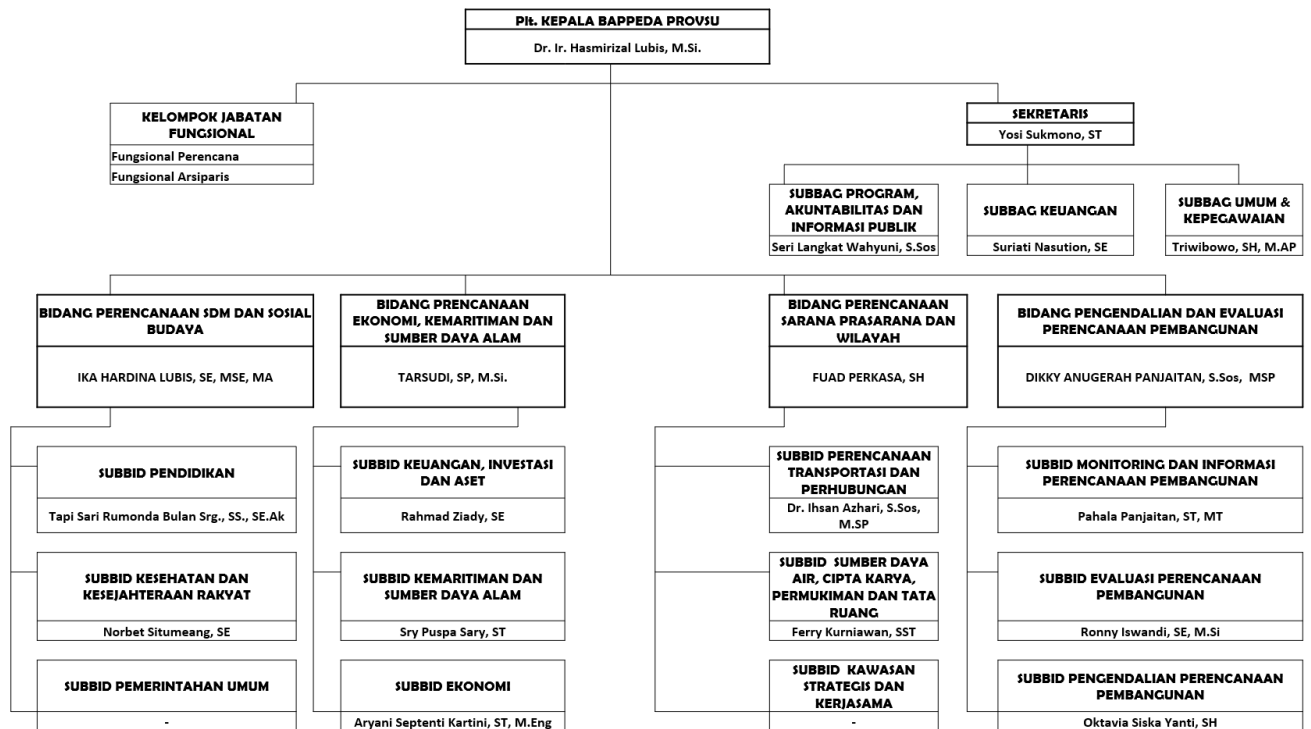
dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akuntansi pertanggungjawaban pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Utara.

Struktur Organisasi

Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Utara Struktur Organisasi telah jelas menggambarkan jenjang wewenang, tanggung jawab, tugas dan kewajiban setiap tingkatan kantor dengan baik. Dan telah merumuskan dengan njelas fungsi-fungsi pokok, tugas dan tanggung jawab unit kerja. Hal ini dapat dilihat dari penggambaran secara jelas pembagian wewenang dan tanggungjawab untuk tiap tingkatan manajemen dan hubungan kerja antar bagian-bagian dalam lembaga.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BAPPEDA SU)

Anggaran

Anggaran (budget) adalah perencanaan keuangan untuk masa depan, anggaran memuat tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sebelum menyusun anggaran organisasi harus mengembangkan rencana strategis (strategic plan) yaitu mengidentifikasi strategi aktivitas dan operasi masa depan, yang biasanya berjangka lima tahun. Keseluruhan strategi diterjemahkan dalam tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan inilah yang menjadi dasar

penyusunan anggaran. Jadi anggaran inilah yang merupakan komitmen dari masing-masing pihak dalam perusahaan untuk bekerja sama mewujudkan rencana jangka pendek guna mencapai tujuan jangka panjang.

Dalam suatu organisasi, anggaran memegang peran penting dimana anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi berdasarkan adanya tuntutan masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik yang menuntut setiap organisasi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada tata pemerintahan yang baik. Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Utara penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Medan Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset dengan berkoordinasi Sekretaris Daerah.

Tabel 2.1

Realisasi anggaran belanja Aset tetap pada BAPPEDA Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (RP)	Realisasi (RP)
2019	72.789.665.790,00	72.394.584.680,00
2020	71.679.182.941,00	69.092.845.180,00
2021	73.152.872.998,00	71.265.042.880,00

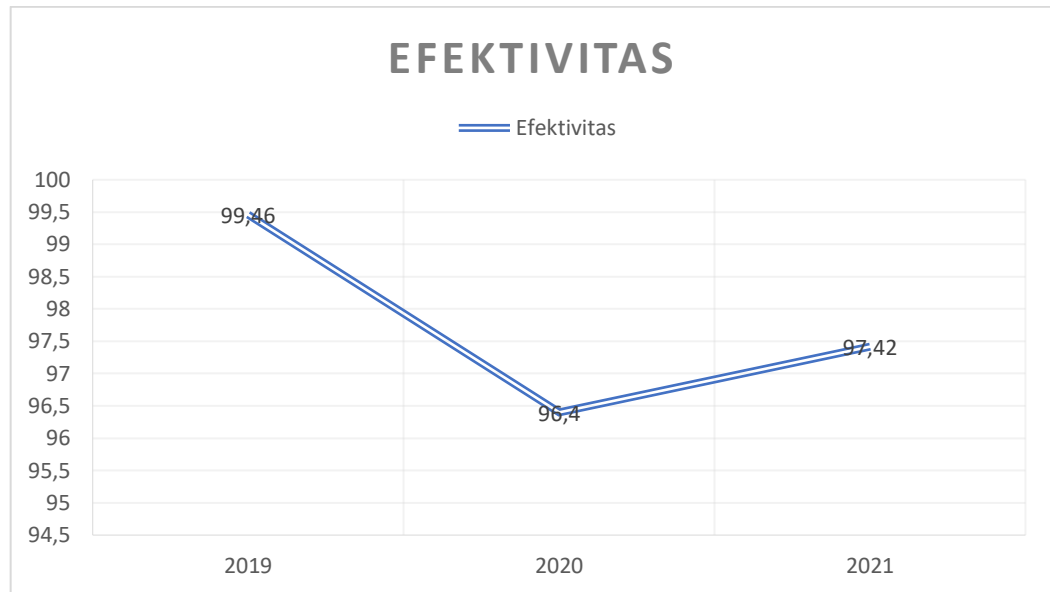
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah di bandingkan dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi rill, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk.

Tabel 2.2

Tingkat efektivitas anggaran belanja Aset tetap dari tahun 2019–2021 pada BAPPEDA Medan Provinsi Sumatera Utara.

tahun	Target Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Tingkat Efektifitas (%)	Kreteria
2019	72.789.665.790,00	72.394.584.680,00	99,46	Efektif
2020	71.679.182.941,00	69.092.845.180,00	96,40	Efektif
2021	73.152.872.998,00	71.265.042.880,00	97,42	Efektif

Berdasarkan hasil yang di dapat dari perhitungan di atas pada BAPPEDA Medan Provinsi Sumatera Utara dan hasil wawancara penulis maka dapat di jelaskan bahwa pengukuran tingkat efektivitas di ketahui melalui rasio antara realisasi pendapatan asli desa dengan hasil kekayaan desa.



Berdasarkan table dan diagram diatas maka dijelaskan Rasio efektivitas tahun 2019 BAPPEDA Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 99,46%, pada tahun 2020 tingkat efektivitas menurun 3,07 % menjadi 96,40% dan pada tahun 2021 tingkat efektivitas meningkat dalam skala kecil yaitu 1,02 % menjadi 97,42%, maka kecenderungan peranan akuntansi pertanggungjawaban biaya pada badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Sumatera Utara dapat dikatakan dalam kriteria sangat efektif, sehingga hasil pada penelitian ini di anggap positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya dan Kinerja Manajerial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumatera Utara berdasarkan rata-rata jawaban responden terhadap Akuntansi Pertanggungjawaban mendapatkan respon yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari garis kontinum responden terhadap pernyataan yaitu, sebesar 57,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntansi pertanggungjawaban pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumatera Utara sudah berjalan dengan sangat baik dan berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. (2017). Pengaruh Kejelasan Anggaran Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Laporan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan Pada Kabupaten dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tesis Yogyakarta, 02*.
- Basar, N. F. (2018). Akuntansi Pertanggungjawaban Biaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Maros. *Jurnal Economix, Volume 6*(Nomor1).

- Chariri, G. d. (2019). *Teori Akuntansi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Daniri, A. (2018). *Good Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Dwi, M. (2019). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. S. (2017). *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendryani, R. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Bisnis dan Ekonomi, vol.22(1)*.
- Hermansyah, I, Rahman, R., & Suherman, M. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Survei Pada Dinas Daerah Kotatasikmalaya). *Jurnal Akuntansi, 13(1)*, 21-29.
- Hery. (2018). *Teorio Akuntansi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Khasanah, N. L. (2019). Pengaruh Karakteristik Kompleksitas Dan Temuan Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Dionegoro Of Accounting, Vol.3(3)*.
- Kotler. (2017). *Prrinsip-Prinsip Managemen*. jakarta: erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Meliza, W. (2019). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Peningkatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Eksplorasi Akuntansi, vol 1(3)*.
- Pratama, K. A. (2018). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah daerah, Kekayaan Daerah belanja daerah terhadap pelaporan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi, Vol. 3(1)*.
- Sawir, A. (2019). *Analisa Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan* . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Se Tin, T. H. (2020). Analisis Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajer Pusat Laba di warung Paskal Bandung. *Jurnal Akuntansi, Vol 4(No 2)*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukhemi. (2017). Pengaruh Aksesibilitas dan Tingkat Pengungkapan laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *8*, 84-95.
- Suriadi, P. T. (2018). Pengaruh Kekayaan Daerah, Totak Aset, Jumlah Penduduk, Tingkat Ketergantungan, dan temuan Audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal*
- Yogi Setiyo Langgeng, E. D. (2019). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pusat Biaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 3(Nomor 6)*.